

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RKT OPD)**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahunan adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RKT OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RKT OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RKT memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran, serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD.

Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun yang merupakan hasil kesepakatan seluruh stakeholder. RKPD disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik dimana harus ada keseimbangan antara perencanaan teknokratis, partisipatif, politis, bottom-up serta top-down.

Dokumen RKT Sekretariat Daerah Tahun 2021 menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan meneruskan arah pembangunan di bidang administrasi pemerintahan serta penyusunan kebijakan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021. Disamping itu, RKT yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan. Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. RKT pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan RKT dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan RKT Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja dan review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum RKT Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun

- 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rencana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2021 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan dan Penerapan RKT Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk :

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang ke sekretariatan daerah;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

b. Tujuan

Rencana KKT Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
3. Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah;
4. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Bagian –Bagian pada Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan
6. Adanya kontribusi Sekretariat Daerah bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RKT Sekretariat Daerah Tahun 2021 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKT, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKT SKPD, proses Penyusunan RKT, keterkaitan antara RKT SKPD dengan dokumen Renstra SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK. Dan kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RKT SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahan dalam penulisan RKT SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RKT SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan RKT Sekretariat Daerah tahun 2020 dan capaian Renstra Sekretariat Daerah, Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKT Sekretariat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RKT Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program

dan kegiatan pelaksanaan RKT Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan RKT Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Berisikan uraian sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan RKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi.
3. Peluang dan tantangan dalam peningkatan pelayanan, dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk menindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

3.1 Reviu terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

3.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran RKT Sekretariat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Berisikan rencana program dan kegiatan mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan, antara lain meliputi:

- 3.1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
- 3.2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut Sumber pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 telah dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dan kemudian menjadi dasar penyusunan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

RKT Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut RKT Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Sekretariat Daerah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong terlaksananya berbagai program pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penguatan terhadap struktur organisasi pada Sekretariat Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih.

Peningkatan kompetensi aparatur dan ketersediaan sarana dan sarana penunjang tugas merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah. Setiap aparatur memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling menunjang dalam pelaksanaan tugas. Agar tercapainya kompetensi aparatur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, maka perlu dilakukan peningkatan keahlian dan pengetahuan terhadap aparatur tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap bidang tugas menjadikan pekerjaan makin efektif dan efisien. Sejalan dengan itu peralatan pendukung juga harus memadai sehingga bisa maksimal dalam pemanfaatan teknologi.

Perbaikan dan peningkatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) harus secara berkesinambungan dioptimalisasi guna mencapai kondisi ideal yang akan secara maksimal menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelaksanaan program-program pembangunan yang tersebar pada OPD di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan koordinasi agar terlaksana sinergi tugas antar OPD. Untuk itu perlu ditetapkan Standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi, seperti tata naskah dinas, laporan pelaksanaan pembangunan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

a. Kondisi Organisasi dan Aparatur.

Sekretariat Daerah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong terlaksananya berbagai program pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penguatan terhadap struktur organisasi pada Sekretariat Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih.

Peningkatan kompetensi aparatur dan ketersediaan sarana dan sarana penunjang tugas merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah. Setiap aparatur memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling menunjang dalam pelaksanaan tugas. Agar tercapainya kompetensi aparatur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, maka perlu dilakukan peningkatan keahlian dan pengetahuan terhadap aparatur tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap bidang tugas menjadikan pekerjaan makin efektif dan efisien. Sejalan dengan itu peralatan pendukung juga harus memadai sehingga bisa maksimal dalam pemanfaatan teknologi.

Perbaikan dan peningkatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) harus secara berkesinambungan dioptimalisasi guna mencapai kondisi ideal yang akan secara maksimal menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelaksanaan program-program pembangunan yang tersebar pada OPD di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan koordinasi agar terlaksana sinergi tugas antar OPD. Untuk itu perlu ditetapkan Standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi, seperti tata naskah dinas, laporan pelaksanaan pembangunan.

b. Kondisi Sosial dan Budaya

Tergradasinya nilai-nilai adat, budaya dan agama di kalangan generasi muda merupakan tantangan pembangunan dimasa depan. Nilai-nilai filosofis adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah semakin tergerus dalam pelaksanaannya.

Kondisi yang demikian jika dibiarkan berlangsung tanpa adanya peran aktif pemerintah dalam mengatasinya dapat menimbulkan kerawanan sosial. Lunturnya nilai-nilai adat, budaya dan agama akan berdampak terhadap pembangunan baik pembangunan bidang sumberdaya manusia, pembangunan fisik, maupun terhadap lingkungan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020 masih ditemui kendala-kendala, sehingga beberapa program dan kegiatan belum berjalan optimal sebagaimana yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang masih belum optimal pelaksanaannya diantaranya terlihat pada masih rendahnya serapan dana yang telah dialokasikan untuk program atau kegiatan dimaksud. Program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a. Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kab. Pessel

Permasalahan:

- Sulit mengidentifikasi ajaran-ajaran Aliran Kepercayaan masyarakat.
- Belum adanya mekanisme yang baku tentang proses pengawasan dan pelarangan aliran kepercayaan yang diduga sesat.

b. Operasionlalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kab. Pessel

Permasalahan:

- Sulitnya memetakan potensi konflik secara rinci masing-masing Kecamatan disebabkan karena kondisi masyarakat yang dinamis.
- Sulitnya memantau potensi konflik dimasing-masing Kecamatan.
- Terbatasnya sarana mobilitas.

2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal

a. Komunitas Intelijen Daerah

Permasalahan:

- Masing-masing unsur memiliki keterbatasan waktu untuk rapat koordinasi sehingga koordinasi formal (rapat) lebih sedikit tetapi koordinasi non formal yang lebih menonjol.
- Sumber daya manusia yang ada belum memiliki keahlian Intelijen atau belum ada yang ikut Diklat Intelijen.
- Latar pendidikan staf di bidang politik belum ada.

b. Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Permasalahan:

- Banyaknya tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan untuk diselesaikan oleh Kesbangpol sementara kegiatan yang tersedia tidak mampu menampungnya.

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Kegiatan Forum Kewaspadaan dini masyarakat

Permasalahan:

- Berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2006, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibentuk ditingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/desa. Pada saat ini yang telah dibentuk baru ditingkat Kabupaten sehingga informasi tentang gangguan keamanan dan bencana alam belum terhimpun secara merata.
- Belum adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang Sosiologi.

4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

a. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Permasalahan:

- Banyaknya target sasaran yang harus diberikan sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sementara anggaran yang ada tidak memadai untuk dilakukannya Sosialisasi.
- Belum adanya Puskesmas yang menjadi Instansi Penerima Wajib Laport di Kabupaten Pesisir Selatan.

- Belum adanya panti rehabilitasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Program Pendidikan Politik masyarakat

- a. Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Ormas/LSM sesuai UU Keormasan

Permasalahan:

- Banyaknya pendirian Ormas/LSM yang tidak memberi pemberitahuan ke Kesbangpol.
- Perubahan data Kepungurusan Ormas/LSM yang ada tidak di update.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan daerah.

Permasalahan :

- Laporan yang diberikan tidak tepat waktu, sehingga menyulitkan untuk membuat lapor bulanan yang terkini sebagai bahan evaluasi pekerjaan.

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- a. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Permasalahan :

- Belum adanya tersedia sistem aplikasi yang dapat menyimpan data – data kepegawaian serta arsip–arsip kepegawaian secara on line / komputerisasi.

8. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda

- a. Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Permasalahan :

- Pokja Pengadaan Barang dan Jasa masih bersifat *Adhoc*, sehingga proses pengadaan barang dan jasa kurang fokus, karena anggota pokja masih dibebani dengan tanggung jawab di instansi asal mereka.

9. Program Pemantapan Otonomi Daerah

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Permasalahan :

- Kurangnya perhatian dari Kepala Perangkat Daerah dalam penyampaian data, sehingga data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah tidak valid, ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian data yang disampaikan dengan data pendukung yang diberikan.
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam penunjang terlaksananya Kegiatan Penyusunan LPPD
- Kurangnya petunjuk teknis dalam penyusunan LPPD

10. Program Advokasi Pemerintah Daerah

a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum

Permasalahan :

- Adanya persoalan dalam hal pengalihan hak oleh Camat selaku PPAT dalam perbuatan hukum jual beli, hibah dan lain sebagainya sehingga terjadi persoalan hukum yang berakhir pada lembaga peradilan.
- Permasalahan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah terhadap tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum.
- Permasalahan Pemberian Izin Usaha Pertambangan dan izin sebagainya.

11. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

Permasalahan :

- Masih belum aktifnya sekretariat UKS kecamatan dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang ada pada tiap jenjang pendidikan .
- Pembangunan lokal baru **tidak diiringi** dengan pembangunan toilet dan tempat cuci tangan baru
- Para pengambil kebijakan kurang respon terhadap kegiatan UKS ini.

12. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

a. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Permasalahan :

- Belum terdistribusinya koran ke Nagari-nagari secara merata
- Banyaknya media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers

- Banyak wartawan yang belum memiliki kompetensi dari organisasi profesi dari organisasi profesi

b. Kegiatan Publikasi dan Promosi Daerah

Permasalahan :

- Terlalu banyak media yang bekerja untuk mempublikasikan kegiatan Pemerintah Daerah
- Publikasi di Media Sosial Terkait Kegiatan Pemerintah Daerah Yang Masih menggunakan Perangkat Pribadi

c. Kegiatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah

Permasalahan :

- Masih menggunakan media Konvensional/ pajangan
- Proses penyimpanan Foto dan Video yang terbatas

13. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur

a. Kegiatan Monev Kinerja SKPD

Permasalahan :

- Kurangnya respon Perangkat Daerah dalam memenuhi permintaan data untuk Penilaian Kinerja Perangkat Daerah
- Sering tidak tepat waktu penyampaian data penilaian kinerja Perangkat

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD tahun 2021 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.3. Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan.

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

No	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Prenting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Pesisir Selatan	Persentase peningkatan Kinerja Penyelenggaraan	80%	Rp 25,013,941,929	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Pesisir Selatan	Persentase peningkatan Kinerja Penyelenggaraan	80%	Rp 25,013,941,929	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Persentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	12	Rp 124,565,558	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Persentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	12	Rp 124,565,558	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Ketersediaan pembinaan pengelolaan perencanaan lingkup sekretariat daerah	4	Rp 124,565,558	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Ketersediaan pembinaan pengelolaan perencanaan lingkup sekretariat daerah	4	Rp 124,565,558	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	12	Rp 14,020,115,964	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat	12	Rp 14,020,115,964	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pesisir Selatan	Pembayaran gaji, Tunjangan dan tambahan penghasilan	12	Rp 13,828,332,539	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pesisir Selatan	Pembayaran gaji, Tunjangan dan tambahan	12	Rp 13,828,332,539	
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pesisir Selatan	Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan	12	Rp 142,172,451	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pesisir Selatan	Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan	12	Rp 142,172,451	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Pesisir Selatan	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan	12	Rp 49,610,974	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Pesisir Selatan	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan,	12	Rp 49,610,974	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	12	Rp 133,477,480	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	12	Rp 133,477,480	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	4	Rp 133,477,480	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	4	Rp 133,477,480	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Terlaksananya Administrasi Umum Sekretariat Daerah	12	Rp 1,142,580,532	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesisir Selatan	Terlaksananya Administrasi Umum Sekretariat Daerah	12	Rp 1,142,580,532	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan	12	Rp 42,088,430	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Pesisir Selatan	Tersedianya komponen instalasi listrik /	12	Rp 42,088,430	
7	Penyediaan Peralatn dan Pelengkapan kantor	Pesisir Selatan	Jumlah perlatan gedung kantor yang dibeli, Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor, Tersedianya peralatan dan	12	Rp 34,988,640	Penyediaan Peralatn dan Pelengkapan kantor	Pesisir Selatan	Jumlah perlatan gedung kantor yang dibeli, Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor, Tersedianya	12	Rp 34,988,640	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pesisir Selatan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	Rp 214,973,122	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pesisir Selatan	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	Rp 214,973,122	
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pesisir Selatan	Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu	12	Rp 258,947,090	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pesisir Selatan	Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan	12	Rp 258,947,090	

No	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Prenting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pesisir Selatan	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk	12	Rp 509,935,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pesisir Selatan	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas	12	Rp 509,935,000	
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pesisir Selatan	Tertatanya Arsip Dinamis Sekretariat daerah	12	Rp 81,648,250	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pesisir Selatan	Tertatanya Arsip Dinamis Sekretariat daerah	12	Rp 81,648,250	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diusulkan	12	Rp 406,057,625	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pesisir Selatan	Jumlah Barang Milik Daerah yang diusulkan	12	Rp 406,057,625	
12	Pengadaan Mebel	Pesisir Selatan	Terlaksananya pengadaan meubiler	12	Rp 288,607,330	Pengadaan Mebel	Pesisir Selatan	Terlaksananya pengadaan meubiler	12	Rp 288,607,330	
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pesisir Selatan	terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	12	Rp 117,450,295	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pesisir Selatan	terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	12	Rp 117,450,295	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	12	Rp 2,066,779,571	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	12	Rp 2,066,779,571	
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pesisir Selatan	ketersediaan layanan surat menyurat	12	Rp 118,453,840	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pesisir Selatan	ketersediaan layanan surat menyurat	12	Rp 118,453,840	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Pesisir Selatan	terbayar rekening listrik, air dan telepon	12	Rp 860,144,851	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Pesisir Selatan	terbayar rekening listrik, air dan telepon	12	Rp 860,144,851	
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pesisir Selatan	penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor	12	Rp 104,903,210	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pesisir Selatan	penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor	12	Rp 104,903,210	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pesisir Selatan	Terbayarnya honorarium Tenaga kontrak (Pegawai Honor) Tersediannya operasionalisasi untuk	12	Rp 983,277,670	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pesisir Selatan	Terbayarnya honorarium Tenaga kontrak (Pegawai Honor) Tersediannya operasionalisasi untuk	12	Rp 983,277,670	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesisir Selatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	12	Rp 2,414,227,660	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pesisir Selatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Sekretariat	12	Rp 2,414,227,660	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Pesisir Selatan	terpeliharaanya mobil jabatan kepala daerah/wakil kepla daerah	12	Rp 523,971,260	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Pesisir Selatan	terpeliharaanya mobil jabatan kepala daerah/wakil kepla daerah	12	Rp 523,971,260	
19	Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Pesisir Selatan	terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	12	Rp 1,008,420,990	Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Pesisir Selatan	terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	12	Rp 1,008,420,990	
20	Pemeliharaan Mebel	Pesisir Selatan	terpeliharanya mebel	12	Rp 10,000,000	Pemeliharaan Mebel	Pesisir Selatan	terpeliharanya mebel	12	Rp 10,000,000	
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pesisir Selatan	Tersedianya biaya perawatan peralatan kerja	12	Rp 229,150,160	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pesisir Selatan	Tersedianya biaya perawatan peralatan kerja	12	Rp 229,150,160	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pesisir Selatan	Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya	12	Rp 343,539,600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pesisir Selatan	Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya	12	Rp 343,539,600	
23	Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pesisir Selatan	Terpeliharanya sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	12	Rp 299,145,650	Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Pesisir Selatan	Terpeliharanya sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	12	Rp 299,145,650	

No	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Prenting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pesisir Selatan	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Rp 822,179,429	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pesisir Selatan	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Rp 822,179,429	
24	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	Pesisir Selatan	Pembayaran gaji, tunjangan kepala daerah dan wakil	12	Rp 192,604,429	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	Pesisir Selatan	Pembayaran gaji, tunjangan kepala daerah	12	Rp 192,604,429	
25	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pesisir Selatan	Terlaksana pengadaan pakaian dinas hari tertentu Tersediannya pakaian dinas dan atribut kelengkapan	12	Rp 209,575,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pesisir Selatan	Terlaksana pengadaan pakaian dinas hari tertentu Tersediannya pakaian dinas dan atribut kelengkapan	12	Rp 209,575,000	
26	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pesisir Selatan	Terlaksananya Mrdical check UP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Rp 20,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pesisir Selatan	Terlaksananya Mrdical check UP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Rp 20,000,000	
27	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	12	Rp 400,000,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	12	Rp 400,000,000	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Pesisir Selatan	Terfasilitasinya Anggaran Rumah Tangga Sekretariat	12	Rp 2,338,959,380	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Pesisir Selatan	Terfasilitasinya Anggaran Rumah Tangga Sekretariat	12	Rp 2,338,959,380	
28	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Pesisir Selatan	Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas KDH tersedianya kebutuhan rumah tangga kepala daerah Tersedianya komponen	12	Rp 1,062,511,680	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Pesisir Selatan	Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas KDH tersedianya kebutuhan rumah tangga kepala daerah Tersedianya	12	Rp 1,062,511,680	
29	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil	Pesisir Selatan	Tersedianya kebutuhan rumah tangga wakil kepala	12	Rp 790,238,900	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil	Pesisir Selatan	Tersedianya kebutuhan rumah tangga wakil kepala	12	Rp 790,238,900	
30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat	Pesisir Selatan	Tersediannya kebutuhan rumah tangga sekretaris	12	Rp 486,208,800	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat	Pesisir Selatan	Tersediannya kebutuhan rumah tangga sekretaris	12	Rp 486,208,800	
	Penataan Organisasi	Pesisir Selatan	Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100%	Rp 354,306,098	Penataan Organisasi	Pesisir Selatan	Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat	100%	Rp 354,306,098	
31	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pesisir Selatan	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah bupati tentang uraian tugas perangkat daerah, Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang struktur organisasi, tersusunnya penataan	45	Rp 140,757,100	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pesisir Selatan	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah bupati tentang uraian tugas perangkat daerah, Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang struktur	45	Rp 140,757,100	
32	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pesisir Selatan	Evaluasi sistem informasi pelayanan publik Terfasilitasinya kompetisi inovasi pelayanan publik	36	Rp 60,014,370	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pesisir Selatan	Evaluasi sistem informasi pelayanan publik Terfasilitasinya kompetisi inovasi pelayanan publik	36	Rp 60,014,370	

No	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Prenting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pesisir Selatan	Nilai Reformasi Birikrasi	BB	Rp 27,549,176	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pesisir Selatan	Nilai Reformasi Birikrasi	BB	Rp 27,549,176	
34	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pesisir Selatan	Terlaksananya monitoring serta evaluasi pelaksanaan pelayanan publik, Terlaksananya survey kepuasan masyarakat	24	Rp 40,025,830	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pesisir Selatan	Terlaksananya monitoring serta evaluasi pelaksanaan pelayanan publik, Terlaksananya survey kepuasan masyarakat	24	Rp 40,025,830	
35	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Pesisir Selatan	Nilai saki kabupaten pesisir selatan	BB	Rp 85,959,622	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Pesisir Selatan	Nilai saki kabupaten pesisir	BB	Rp 85,959,622	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pesisir Selatan	Terlaksananya Kegiatan Protokol dan Komunikasi	12	Rp 1,190,692,632	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pesisir Selatan	Terlaksananya Kegiatan Protokol dan Komunikasi	12	Rp 1,190,692,632	
36	Fasilitasi Keprotokolan	Pesisir Selatan	Terlaksanya fasilitasi kegiatan keprotokolan	12	Rp 153,923,160	Fasilitasi Keprotokolan	Pesisir Selatan	Terlaksanya fasilitasi kegiatan keprotokolan	12	Rp 153,923,160	
37	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pesisir Selatan	Terlaksananya publikasi kegiatan pimpinan diberbagai media dan pembayaran tagihan	27	Rp 809,279,808	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pesisir Selatan	Terlaksananya publikasi kegiatan pimpinan diberbagai media dan pembayaran tagihan	27	Rp 809,279,808	
38	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pesisir Selatan	terlaksannya dokumentasi dalam bentuk photo, video dan dokumentasi terpublikasinya peliputan kegiatan pemda	12	Rp 227,489,664	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pesisir Selatan	terlaksannya dokumentasi dalam bentuk photo, video dan dokumentasi terpublikasinya peliputan kegiatan pemda	12	Rp 227,489,664	
39											
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pesisir Selatan	Meningkatnya Peran Serta Pemerintah dalam Kegiatan Keagamaan dan sosial masyarakat	100%	Rp 6,770,350,898	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pesisir Selatan	Meningkatnya Peran Serta Pemerintah dalam Kegiatan Keagamaan dan sosial masyarakat	100%	Rp 6,770,350,898	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Pesisir Selatan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan dan	100%	Rp 227,698,670	Administrasi Tata Pemerintahan	Pesisir Selatan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan dan	100%	Rp 227,698,670	
40	Penataan Administrasi Pemerintahan	Pesisir Selatan	Jumlah fasilitasi rakor gubernur dengan kabupaten/kota ,Jumlah penyelesaian permasalahan di kecamatan, Terfasilitasinya	12	Rp 130,082,624	Penataan Administrasi Pemerintahan	Pesisir Selatan	Jumlah fasilitasi rakor gubernur dengan kabupaten/kota ,Jumlah penyelesaian permasalahan di kecamatan,	12	Rp 130,082,624	
41	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pesisir Selatan	Jumlah fasilitasi penetapan dan penegasan batas nagari	2	Rp 45,253,124	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pesisir Selatan	Jumlah fasilitasi penetapan dan penegasan batas nagari	2	Rp 45,253,124	
42	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pesisir Selatan	jumlah rakor camat dengan perangkat daerah, Jumlah rakor kecamatan yang dihadiri jumlah rapat koordinasi kecamatan	12	Rp 52,362,922	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pesisir Selatan	jumlah rakor camat dengan perangkat daerah, Jumlah rakor kecamatan yang dihadiri jumlah rapat koordinasi kecamatan	12	Rp 52,362,922	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pesisir Selatan	Terfasilitasinya kebijakan pengelolaan kesejahteraan	12	Rp 6,173,103,528	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pesisir Selatan	Terfasilitasinya kebijakan pengelolaan kesejahteraan	12	Rp 6,173,103,528	

No	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Prenting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pesisir Selatan	Jumlah ceramah agama yang dilaksanakan, Jumlah jemaah haji yang difasilitasi, Jumlah kecamatan yang memiliki lembaga didikan subuh yang dibina, Jumlah koordinasi dan konsultasi kesejahteraan rakyat dan urusan	185	Rp 5,531,811,990	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pesisir Selatan	Jumlah ceramah agama yang dilaksanakan, Jumlah jemaah haji yang difasilitasi, Jumlah kecamatan yang memiliki lembaga didikan subuh yang dibina, Jumlah koordinasi dan konsultasi kesejahteraan rakyat dan urusan	185	Rp 5,531,811,990	
44	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian	Pesisir Selatan	Tersedianya data hasil movev terhadap UKS yang	15	Rp 72,634,580	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian	Pesisir Selatan	Tersedianya data hasil movev terhadap UKS yang	15	Rp 72,634,580	
45	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pesisir Selatan	Terbantunya mahasiswa unggul pada perguruan tinggi negeri yang terakreditasi A	125	Rp 568,656,958	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pesisir Selatan	Terbantunya mahasiswa unggul pada perguruan tinggi negeri yang	125	Rp 568,656,958	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pesisir Selatan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	Rp 328,314,258	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pesisir Selatan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	Rp 328,314,258	
46	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Pesisir Selatan	jumlah keputusan bupati yang di validasi, Jumlah peraturan Bupati yang ditetapkan, Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan, Jumlah Peraturan	546	Rp 119,935,658	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Pesisir Selatan	jumlah keputusan bupati yang di validasi, Jumlah peraturan Bupati yang ditetapkan, Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan, Jumlah	546	Rp 119,935,658	
47	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Data KKP HAM dan Aksi Ham B, BB dan B12 Jumlah Perkara Hukum Pemerintah Daerah yang	106	Rp 151,577,712	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Data KKP HAM dan Aksi Ham B, BB dan B12 Jumlah Perkara Hukum Pemerintah Daerah yang	106	Rp 151,577,712	
48	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pesisir Selatan	Jumlah Berita Daerah yang di publikasi Jumlah lembaran Daerah yang publikasi Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah	301	Rp 56,800,888	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pesisir Selatan	Jumlah Berita Daerah yang di publikasi Jumlah lembaran Daerah yang publikasi Jumlah Sosialisasi Peraturan	301	Rp 56,800,888	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Kerjasama yang difasilitasi	5	Rp 41,234,442	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Kerjasama yang difasilitasi	5	Rp 41,234,442	
49	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Pesisir Selatan	Jumlah asisten MOU Kerjasama dengan pihak ke tiga Jumlah MOU dan Perjanjian Kerjasama (PKS)	5	Rp 41,234,442	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Pesisir Selatan	Jumlah asisten MOU Kerjasama dengan pihak ke tiga Jumlah MOU dan Perjanjian Kerjasama (PKS)	5	Rp 41,234,442	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pesisir Selatan	Meningkatnya Layanan Bidang Perekonomian dan	85%	Rp 746,786,397	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pesisir Selatan	Meningkatnya Layanan Bidang Perekonomian dan	85%	Rp 746,786,397	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pesisir Selatan	Terlaksananya Peningkatan Perekonomian di Pesisir	100%	Rp 128,383,644	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pesisir Selatan	Terlaksananya Peningkatan Perekonomian di Pesisir	100%	Rp 128,383,644	

No	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Prenting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pesisir Selatan	Terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida Terlaksananya pengendalian inflasi daerah	2	Rp 53,999,030	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pesisir Selatan	Terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida Terlaksananya pengendalian inflasi daerah	2	Rp 53,999,030	
51	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Pesisir Selatan	K-Per pada Bank Nagari Cabang Painan dan Tapan persiapan operasional PT Pesona Revisi ranperda	4	Rp 74,384,614	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Pesisir Selatan	K-Per pada Bank Nagari Cabang Painan dan Tapan persiapan operasional PT Pesona Revisi ranperda	4	Rp 74,384,614	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pesisir Selatan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	100%	Rp 166,703,586	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pesisir Selatan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	100%	Rp 166,703,586	
52	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Pesisir Selatan	Jumlah Buku ASB Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2022, Jumlah Buku Sisdur Perjalanan Dinas	255	Rp 65,591,922	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Pesisir Selatan	Jumlah Buku ASB Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2022, Jumlah Buku Sisdur	255	Rp 65,591,922	
53	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pesisir Selatan	Jumlah koordinasi pembangunan daerah yang dilakukan Jumlah rapat evaluasi program	12	Rp 56,804,664	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pesisir Selatan	Jumlah koordinasi pembangunan daerah yang dilakukan Jumlah rapat evaluasi program	12	Rp 56,804,664	
54	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan daerah	96	Rp 44,307,000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	Pesisir Selatan	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan	96	Rp 44,307,000	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pesisir Selatan	Terlaksananya Proses Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Daerah	12	Rp 387,198,397	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pesisir Selatan	Terlaksananya Proses Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Daerah	12	Rp 387,198,397	
55	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pesisir Selatan	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Dengan Aturan yang berlaku serta tersedianya Perangkat dan Sistem untuk	12	Rp 218,999,704	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pesisir Selatan	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Dengan Aturan yang berlaku serta tersedianya Perangkat dan Sistem untuk	12	Rp 218,999,704	
56	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pesisir Selatan	Jumlah OPD yang difasilitasi dalam pelayanan pengadaan secara elektronik	45	Rp 95,798,736	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pesisir Selatan	Jumlah OPD yang difasilitasi dalam pelayanan pengadaan	45	Rp 95,798,736	
57	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan	Pesisir Selatan	Terpenuhi Fungsional PBJ dan Pengembangan	3	Rp 72,399,957	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan	Pesisir Selatan	Terpenuhi Fungsional PBJ dan Pengembangan	3	Rp 72,399,957	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pesisir Selatan	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi dan	100%	Rp 64,500,770	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pesisir Selatan	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi dan	100%	Rp 64,500,770	
58	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Pesisir Selatan	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan HET dan Pendistribusian LPG 3 Kg, Terlaksananya Sosialisasi	15	Rp 64,500,770	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Pesisir Selatan	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan HET dan Pendistribusian LPG 3 Kg, Terlaksananya Sosialisasi	15	Rp 64,500,770	

No	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Prenting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kesatuan Bangsa dan Politik					Kesatuan Bangsa dan Politik					
	Program Penguatan Ideologi Pamcasila dan Karajter Kebangsaan	Pesisir Selatan	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara	85%	Rp 152,852,444	Program Penguatan Ideologi Pamcasila dan Karajter Kebangsaan	Pesisir Selatan	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara	85%	Rp 152,852,444	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pesisir Selatan	Meningkatnya rasa kesadaran dalam mewujudkan kecintaan berbangsa dan bernegara	8	Rp 152,852,444	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pesisir Selatan	Meningkatnya rasa kesadaran dalam mewujudkan kecintaan berbangsa dan bernegara	8	Rp 152,852,444	
59	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pesisir Selatan	Jumlah Sosialisasi dan pelatihan wawasan kebangsaan dan peningkatan kesadaran bela negara yang dilaksanakan dan negara yang dilaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Forum Pembauran kebangsaan yang dilaksanakan	8	Rp 152,852,444	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pesisir Selatan	Jumlah Sosialisasi dan pelatihan wawasan kebangsaan dan peningkatan kesadaran bela negara yang dilaksanakan dan negara yang dilaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Forum Pembauran kebangsaan yang dilaksanakan	8	Rp 152,852,444	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pesisir Selatan	Adanya pemahaman politik dikalangan masyarakat/aparatur daerah serta terciptanya stabilitasi politik pemerintahan yang kondusif di daerah	85%	Rp 1,105,057,271	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	Pesisir Selatan	Adanya pemahaman politik dikalangan masyarakat/aparatur daerah serta terciptanya stabilitasi politik pemerintahan yang kondusif di daerah	85%	Rp 1,105,057,271	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya bahan pengambil kebijakan pemerintah dalam penanganan	12	Rp 1,105,057,271	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan	Pesisir Selatan	Tersedianya bahan pengambil kebijakan pemerintah dalam penanganan	12	Rp 1,105,057,271	
60	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pesisir Selatan	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai	26	Rp 1,063,967,539	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pesisir Selatan	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai	26	Rp 1,063,967,539	

No	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Prenting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah pemantauan, pelaporan, dan perkembangan politik di daerah Jumlah tahapan pemilu dipantau	8	Rp 41,089,732	Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah pemantauan, pelaporan, dan perkembangan politik di daerah Jumlah tahapan pemilu dipantau	-	Rp 41,089,732	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Pesisir Selatan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	85%	Rp 33,695,148	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Pesisir Selatan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	85%	Rp 33,695,148	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pesisir Selatan	Pembinaan dan Peningkatan kualitas komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas/LSM)	12	Rp 33,695,148	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pesisir Selatan	Pembinaan dan Peningkatan kualitas komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas/LSM)	12	Rp 33,695,148	
62	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya data monev ormas yang mendapat pembinaan	4	Rp 33,695,148	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya data monev ormas yang mendapat pembinaan	4	Rp 33,695,148	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA	Pesisir Selatan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi,	85%	Rp 314,648,314	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA	Pesisir Selatan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan ketahanan	85%	Rp 314,648,314	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pesisir Selatan	Terlaksananya kebijakan teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial dan	12	Rp 314,648,314	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pesisir Selatan	Terlaksananya kebijakan teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial dan	12	Rp 314,648,314	
63	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pesisir Selatan	Narkoba ke Polres Pesisir Selatan pelaksanaan tes urine untuk narkoba bagi asn dan siswa Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika tingkat nagari dan kecamatan	72	Rp 261,858,582	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pesisir Selatan	Narkoba ke Polres Pesisir Selatan pelaksanaan tes urine untuk narkoba bagi asn dan siswa Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika tingkat nagari dan kecamatan	72	Rp 261,858,582	
64	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitas pencegahan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan daerah	4	Rp 52,789,732	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitas pencegahan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan daerah	4	Rp 52,789,732	

No	RANCANAGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Prenting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pesisir Selatan	Meningkatnya Kondusifitas Pemerintah dalam bidang perlindungan Masyarakat	85%	Rp 324,535,356	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Pesisir Selatan	Meningkatnya Kondusifitas Pemerintah dalam bidang perlindungan Masyarakat	85%	Rp 324,535,356	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pesisir Selatan	Terjalinnnya Koordinasi dan Komunikasi dalam penanganan masalah strategis di daerah	12	Rp 324,535,356	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pesisir Selatan	Terjalinnnya Koordinasi dan Komunikasi dalam penanganan masalah strategis di daerah	12	Rp 324,535,356	
65	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	Pesisir Selatan	Jumlah koordinasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	35	Rp 44,514,732	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	Pesisir Selatan	Jumlah koordinasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	35	Rp 44,514,732	
66	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pesisir Selatan	Rapat-rapat forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Rapat-Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM) Rapat-Rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	12	Rp 207,863,892	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pesisir Selatan	Rapat-rapat forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Rapat-Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM) Rapat-Rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	12	Rp 207,863,892	
67	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	Pesisir Selatan	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intejejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing	4	Rp 72,156,732	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	Pesisir Selatan	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intejejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing	4	Rp 72,156,732	
					Rp 34,461,867,757					Rp 34,461,867,757	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan RKT Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dipengaruhi oleh kebijakan/peraturan di tingkat pusat / nasional antara lain RPJMN 2020-2024, Permendagri no 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Beberapa sasaran dan target yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 harus menjadi acuan dalam penyusunan RKT 2021 yang antara lain menargetkan untuk sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola berupa indeks reformasi birokrasi minimal dengan kategori” BAIK”, Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik, Skor Sakip “B”.

Selain itu RKT Setda Tahun 2021 sudah memperhatikan Permendagri No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota serta Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka pada RKT Tahun 2021 sudah di arahkan pada pemetaan kegiatan RKT tahun 2021 ke dalam nomenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga nomenklatur kegiatan juga sudah diarahkan sesuai dengan Tupoksi Setda berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2019.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Tujuan yang diinginkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu secara umum adalah mendukung terciptanya

tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, peningkatan pelayanan pada masyarakat yang didasari dengan ketaatan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Secara umum tujuan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan aparatur yang efektif dan efisien.
2. Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Meningkatnya peran serta aparat Pemerintah dalam Bidang Perlindungan Masyarakat.

Sasaran dari Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan totalitas dari sasaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam rangka merevitalisasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
2. Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan efisien
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
4. Meningkatnya peran serta Pemerintah Daerah dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
5. Meningkatnya Peran Struktur Sosial dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba dan Obat-obat terlarang.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam RKT ini Sekretariat Daerah melaksanakan 8 program, 24 kegiatan dan 66 sub kegiatan dengan jumlah total dana Pagu indikatif sebesar Rp.34.461.867.757,- dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Program kerja dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan disusunlah Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman serta arahan aktivitas

tahunan sebagai penjabaran kegiatan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari rencana strategik dalam mencapai tujuan yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 merupakan pedoman program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam tabel program dan kegiatan ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2021. Untuk selengkapnya rincian program dan kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

TABEL 3.1
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
										target	Rupiah	lokasi
												(GPS, DECIMAL DEGREE)
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SEKRETARIAT DAERAH												
Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan									Indeks Reformasi dan Birokrasi			
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkinerja								Skor LPPD			
									Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik								Indeks Kepuasan Masyarakat			
								Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
		4	01	01				PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	80%	Rp 25,013,941,929	Pesisir Selatan
		4	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sekretariat daerah	12	Rp 124,565,558	Pesisir Selatan
		4	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketersediaan pembinaan pengelolaan perencanaan lingkup sekretariat daerah	4	Rp 124,565,558	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	12	Rp 14,020,115,964	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji, Tunjangan dan tambahan penghasilan	12	Rp 13,828,332,539	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan	12	Rp 142,172,451	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	12	Rp 49,610,974	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	12	Rp 133,477,480	Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
										target	Rupiah	lokasi
												(GPS, DECIMAL DEGREE)
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4	01	01	02	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	4	Rp 133,477,480	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Sekretariat Daerah	12	Rp 1,142,580,532	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12	Rp 42,088,430	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	06	02	Penyediaan Peralatn dan Pelengkapan kantor	Jumlah perlatan gedung kantor yang dibeli, Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor, Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Rp 34,988,640	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	Rp 214,973,122	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu	12	Rp 258,947,090	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	Rp 509,935,000	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Arsip Dinamis Sekretariat daerah	12	Rp 81,648,250	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diusulkan	12	Rp 406,057,625	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan meubiler	12	Rp 288,607,330	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	12	Rp 117,450,295	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	12	Rp 2,066,779,571	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ketersediaan layanan surat menyurat	12	Rp 118,453,840	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayar rekening listrik, air dan telepon	12	Rp 860,144,851	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor	12	Rp 104,903,210	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium Tenaga kontrak (Pegawai Honor) Tersediannya operasionalisasi untuk kebersihan kantor	12	Rp 983,277,670	Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
										target	Rupiah	lokasi
												(GPS, DECIMAL DEGREE)
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4	01	01	02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	12	Rp 2,414,227,660	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya mobil jabatan kepala daerah/wakil kepla daerah	12	Rp 523,971,260	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	09	02	Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	12	Rp 1,008,420,990	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	09	05	Pemeliharaan Mebel	terpeliharanya mebel	12	Rp 10,000,000	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya biaya perawatan peralatan kerja	12	Rp 229,150,160	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya rumah dinas Terpeliharanya RumahRumah Jabatan	12	Rp 343,539,600	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	09	10	Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	12	Rp 299,145,650	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Rp 822,179,429	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran gaji, tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	12	Rp 192,604,429	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksana pengadaan pakaian dinas hari tertentu Tersediannya pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	12	Rp 209,575,000	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Mrdical check UP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Rp 20,000,000	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	12	Rp 400,000,000	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya Anggaran Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12	Rp 2,338,959,380	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas KDH tersedianya kebutuhan rumah tangga kepala daerah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan rumah dinas KDH	12	Rp 1,062,511,680	Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
										target	Rupiah	lokasi
												(GPS, DECIMAL DEGREE)
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4	01	01	02	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	12	Rp 790,238,900	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersediannya kebutuhan rumah tangga sekretaris Daerah	12	Rp 486,208,800	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	13		Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir	100%	Rp 354,306,098	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah bupati tentang uraian tugas perangkat daerah, Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang struktur organisasi, tersusunnya penataan jabatan perangkat daerah	45	Rp 140,757,100	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Evaluasi sistem informasi pelayanan publik Terfasilitasinya kompetisi inovasi pelayanan publik tersedianya dokumen peta proses bisnis	36	Rp 60,014,370	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birikrasi	BB	Rp 27,549,176	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya monitoring serta evaluasi pelaksanaan pelayanan publik, Terlaksananya survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	24	Rp 40,025,830	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai sakiip kabupaten pesisir selatan	BB	Rp 85,959,622	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta kerjasama	12	Rp 1,190,692,632	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksanya fasilitasi kegiatan keprotokolan	12	Rp 153,923,160	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya publikasi kegiatan pimpinan diberbagai media dan pembayaran tagihan kerjasama media massa	27	Rp 809,279,808	Pesisir Selatan
		4	01	01	02	14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	terlaksannya dokumentasi dalam bentuk photo, video dan dokumentasi terpublikasinya peliputan kegiatan pemda terpublikasinya promosi media diluar ruangan	12	Rp 227,489,664	Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
										target	Rupiah	lokasi
												(GPS, DECIMAL DEGREE)
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Peran Serta Pemerintah dalam Kegiatan Keagamaan dan sosial kemasyarakatan	100%	Rp 6,770,350,898	Pesisir Selatan
		4	01	02	02	01		Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	Rp 227,698,670	Pesisir Selatan
		4	01	02	02	01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah fasilitasi rakor gubernur dengan kabupaten/kota ,Jumlah penyelesaian permasalahan di kecamatan, Terfasilitasinya serah terima jabatan camat	12	Rp 130,082,624	Pesisir Selatan
		4	01	02	02	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah fasilitasi penetapan dan penegasan batas nagari	2	Rp 45,253,124	Pesisir Selatan
		4	01	02	02	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah rakor camat dengan perangkat daerah, Jumlah rakor kecamatan yang dihadiri jumlah rapat koordinasi camat dan wali nagari	12	Rp 52,362,922	Pesisir Selatan
Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing								Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat			
	Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing								Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla			
									Persentase yang memenuhi kewajiban membayar zakat harta			
		4	01	02	02	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terfasilitasinya kebijakan pengelolaan kesejahteraan sosial dan masyarakat	12	Rp 6,173,103,528	Pesisir Selatan
		4	01	02	02	02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah ceramah agama yang dilaksanakan, Jumlah jemaah haji yang difasilitasi, Jumlah kecamatan yang memiliki lembaga didikan subuh yang dibina, Jumlah koordinasi dan konsultasi kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan yang dilaksanakan	185	Rp 5,531,811,990	Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
										target	Rupiah	lokasi	
												(GPS, DECIMAL DEGREE)	
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		4	01	02	02	02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Tersedianya data hasil money view terhadap UKS yang dibina	15	Rp	72,634,580	Pesisir Selatan
		4	01	02	02	02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terbantunya mahasiswa unggul pada perguruan tinggi negeri yang terakreditasi A	125	Rp	568,656,958	Pesisir Selatan
		4	01	02	02	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	Rp	328,314,258	Pesisir Selatan
		4	01	02	02	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah keputusan bupati yang di validasi, Jumlah peraturan Bupati yang ditetapkan, Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan, Jumlah Peraturan nagari yang dievaluasi / klarifikasi	546	Rp	119,935,658	Pesisir Selatan
		4	01	02	02	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Laporan Data KKP HAM dan Aksi Ham B, BB dan B12 Jumlah Perkara Hukum Pemerintah Daerah yang diselesaikan	106	Rp	151,577,712	Pesisir Selatan
		4	01	02	02	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Berita Daerah yang di publikasi Jumlah lembaran Daerah yang publikasi Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan	301	Rp	56,800,888	Pesisir Selatan
		4	01	02	02	04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama yang difasilitasi	5	Rp	41,234,442	Pesisir Selatan
		4	01	02	02	04	;01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah asisten MOU Kerjasama dengan pihak ke tiga Jumlah MOU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah	5	Rp	41,234,442	Pesisir Selatan
Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah									Meningkatkan Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat				
	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan								Nilai investasi Swasta dan Masyarakat				
		4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Layanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	85%	Rp	746,786,397	Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
										target	Rupiah	lokasi
												(GPS, DECIMAL DEGREE)
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4	01	03	2	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Peningkatan Perekonomian di Pesisir Selatan	100%	Rp 128,383,644	Pesisir Selatan
		4	01	03	2	01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida Terlaksananya pengendalian inflasi daerah	2	Rp 53,999,030	Pesisir Selatan
		4	01	03	2	01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	K-Per pada Bank Nagari Cabang Painan dan Tapan persiapan operasional PT Pesona Revisi ranperda penyertaan Modal PDAM	4	Rp 74,384,614	Pesisir Selatan
		4	01	03	2	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	100%	Rp 166,703,586	Pesisir Selatan
		4	01	03	2	02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Buku ASB Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2022, Jumlah Buku Sisdur Perjalanan Dinas Jumlah dokumen HSPK	255	Rp 65,591,922	Pesisir Selatan
		4	01	03	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah koordinasi pembangunan daerah yang dilakukan Jumlah rapat evaluasi program pembangunan daerah	12	Rp 56,804,664	Pesisir Selatan
		4	01	03	2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan daerah	96	Rp 44,307,000	Pesisir Selatan
		4	01	03	2	03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Proses Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Daerah Kab.Pesisir Selatan	12	Rp 387,198,397	Pesisir Selatan
		4	01	03	2	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Dengan Aturan yang berlaku serta tersedianya Perangkat dan Sistem untuk Pengadaan barang dan jasa	12	Rp 218,999,704	Pesisir Selatan
		4	01	03	2	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah OPD yang difasilitasi dalam pelayanan pengadaan secara elektronik	45	Rp 95,798,736	Pesisir Selatan
		4	01	03	2	03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terpenuhinya Fungsional PBJ dan Pengembangan Kompetensi PBJ	3	Rp 72,399,957	Pesisir Selatan
		4	01	03	2	04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi dan Sumber Daya Alam	100%	Rp 64,500,770	Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
										target	Rupiah	lokasi
												(GPS, DECIMAL DEGREE)
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4	01	03	2	04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan HET dan Pendistribusian LPG 3 Kg, Terlaksananya Sosialisasi Penghematan Energi dan Air	15	Rp 64,500,770	Pesisir Selatan
Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan Dinamis								Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang aman tentram dan dinamis				
	Meningkatnya Keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas							Persentase Konflik yang tertangani				
	Meningkatnya Peran serta aparat Pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan							Jumlah Konflik yang tertangani oleh Pemerintah Daerah				
		8	01					Kesatuan Bangsa dan Politik				
		8	01	02				Program Penguatan Ideologi Pamcasila dan Karajter Kebangsaan	Meningkatnya Pengetahuan Masyrakat tentang Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara	85%	Rp 152,852,444	Pesisir Selatan
		8	01	02	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya rasa kesadaran dalam mewujudkan kecintaan berbangsa dan bernegara	8	Rp 152,852,444	Pesisir Selatan
		8	01	02	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi dan pelatihan wawasan kebangsaan dan peningkatan kesadaran bela negara yang dilaksanakan dan negara yang dilaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Forum Pembauran kebangsaan yang dilaksanakan	8	Rp 152,852,444	Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
										target	Rupiah	lokasi
												(GPS, DECIMAL DEGREE)
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8	01	03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Adanya pemahaman politik dikalangan masyarakat/aparatur daerah serta terciptanya stabilitasi politik pemerintahan yang kondusif di daerah	85%	Rp 1,105,057,271	Pesisir Selatan
		8	01	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah	Tersedianya bahan pengambil kebijakan pemerintah dalam penanganan	12	Rp 1,105,057,271	Pesisir Selatan
		8	01	03	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai	26	Rp 1,063,967,539	Pesisir Selatan
		8	01	03	2	01	05	Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah	Jumlah pemantauan, pelaporan, dan perkembangan politik di daerah Jumlah tahapan pemilu dipantau	8	Rp 41,089,732	Pesisir Selatan
		8	01	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	85%	Rp 33,695,148	Pesisir Selatan
		8	01	04	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Pembinaan dan Peningkatan kualitas komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas/LSM)	12	Rp 33,695,148	Pesisir Selatan
		8	01	04	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersedianya data movev ormas yang mendapat pembinaan	4	Rp 33,695,148	Pesisir Selatan
		8	01	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	85%	Rp 314,648,314	Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
										target	Rupiah	lokasi
												(GPS, DECIMAL DEGREE)
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8	01	05	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya kebijakan teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	12	Rp 314,648,314	Pesisir Selatan
		8	01	05	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Narkoba ke Polres Pesisir Selatan pelaksanaan tes urine untuk narkoba bagi asn dan siswa Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika tingkat nagari dan kecamatan	72	Rp 261,858,582	Pesisir Selatan
		8	01	05	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan daerah	4	Rp 52,789,732	Pesisir Selatan
		8	01	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya Kondusifitas Pemerintah dalam bidang perlindungan Masyarakat	85%	Rp 324,535,356	Pesisir Selatan
		8	01	06	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terjalinnnya Koordinasi dan Komunikasi dalam penanganan masalah strategis di daerah	12	Rp 324,535,356	Pesisir Selatan
		8	01	06	2	01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	Jumlah koordinasi pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	35	Rp 44,514,732	Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
										target	Rupiah	lokasi
												(GPS, DECIMAL DEGREE)
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8	01	06	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rapat-rapat forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Rapat-Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM) Rapat-Rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	12	Rp 207,863,892	Pesisir Selatan
		8	01	06	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing	4	Rp 72,156,732	Pesisir Selatan
JUMLAH TOTAL ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH											Rp 34,461,867,757	

BAB IV

PENUTUP

Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala di Bagian – Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penyusunan Rencana Kinerja (RKT) dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta *stakeholder* dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan Pejabat Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dokumen RKT 2021 ini sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2021 agar tercapainya visi dan misi Sekretariat Daerah demi menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN**



**Ir. ERIZON, M.T.
NIP. 19630323 199003 1 005**